

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skripsi ini mencoba untuk memaparkan implikasi keanggotaan Australia dalam AUKUS (*Australia, United Kingdom dan United States*) terhadap implementasi *free nuclear movement* di Kawasan Pasifik Selatan. Penelitian ini penting karena memiliki kaitan erat dengan keamanan dan perdamaian kawasan, khususnya Kawasan Pasifik Selatan. Wilayah ini merupakan kawasan *free nuclear* dan memiliki historis kelim berkaitan dengan uji coba nuklir, sehingga dalam sejarahnya terdapat *free nuclear movement* di kawasan ini yang meliputi *Nuclear-Free and Independent Pacific* (NFIP) dan Traktat Rarotonga.

NFIP adalah gerakan awal dari *Free Nuclear Movement* di Kawasan Pasifik Selatan. Traktat Rarotonga adalah perjanjian internasional yang berisi larangan pembuatan, pengujian dan penempatan senjata nuklir di Pasifik Selatan yang menjadikan kawasan ini zona bebas senjata nuklir. Traktat ini mulai berlaku sejak tahun 1985 dan dikenal sebagai *South Pacific Nuclear Free Zone Treaty* (United Nations 1985). Selain itu, ini menjadi indikasi penting untuk dianalisis karena Australia sebagai negara dari Kawasan Pasifik Selatan bergabung dalam AUKUS dan juga merupakan negara yang meratifikasi Traktat Rarotonga.

Penelitian ini berfokus pada implikasi Keanggotaan Australia dalam AUKUS terhadap Implementasi *free nuclear movement* di Kawasan Pasifik Selatan yang dikaji menggunakan *teori regional security complex* yang dicetuskan oleh Barry

Buzan dan Ole Waever. Teori ini merujuk pada keamanan suatu regional yang dipengaruhi oleh hubungan yang terbentuk antar negara di suatu kawasan. Selain itu, terdapat konsep persepsi ancaman oleh Robert Jervis, dan perjanjian internasional untuk memaparkan persepsi ancaman Australia maupun Pasifik Selatan terhadap ancaman di kawasan ini. Sedangkan konsep perjanjian internasional untuk memaparkan keterkaitan antara perjanjian internasional dan pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pada 15 September 2021, terbentuklah aliansi Pakta Pertahanan yang terdiri dari Australia, Inggris dan Amerika Serikat yang disebut AUKUS. Aliansi ini memiliki tujuan utama untuk menciptakan keamanan kolektif melalui penyediaan armada kapal selam bertenaga nuklir dalam beberapa dekade mendatang untuk Angkatan Laut Australia (Khoiriyah dan Aidini 2022, 1). Bagian utama atau Pilar 1 dari AUKUS adalah mendukung Australia dalam memperoleh armada kapal selam bertenaga nuklir pertama yang dipersenjatai secara konvensional (Tobin 2024).

Sementara itu, Australia sejak 1985 sudah meratifikasi Traktat Rarotonga yang menunjukkan Kawasan Pasifik Selatan merupakan zona bebas nuklir. Dengan demikian, posisi Australia sebagai anggota AUKUS sekaligus bagian dari zona bebas nuklir di Pasifik Selatan menimbulkan dilema bagi negara-negara di kawasan ini. Dilema ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara Pasifik Selatan yang melihat langkah Australia sebagai potensi ancaman terhadap rezim non-prolifreasi nuklir dan stabilitas kawasan.

Untuk pertama kali uji coba nuklir di kawasan Pasifik Selatan dilakukan oleh Amerika Serikat. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Inggris mulai melakukan rangkaian program uji coba nuklir di Kawasan Pasifik Selatan yang kemudian disusul oleh Prancis. Amerika Serikat melakukan uji coba nuklir sejak 1946, sedangkan Inggris dari tahun 1952 dan Prancis pada tahun 1966 (Wirengjurit 2002, 221-222).

Dampak yang ditimbulkan dari uji coba nuklir ke beberapa tempat di Kawasan Pasifik Selatan sifatnya merugikan dan merusak yang berdampak pada masalah kesehatan dan lingkungan yang terkena radioaktif (Huber 2021). Dampak ini menjadi faktor pendorong negara-negara kepulauan di wilayah Pasifik Selatan untuk membentuk Kawasan Bebas Senjata Nuklir (KBSN) atau *Nuclear Free Zone* (NFZ).

Perjuangan dalam pembentukan KBSN di Pasifik Selatan tidak terlepas dari dorongan gerakan anti-nuklir yang berkembang di kawasan ini. Masyarakat lokal mulai dari mahasiswa, aktivis lingkungan, organisasi internasional serta negara-negara yang menjadi tempat uji coba nuklir mulai menyuarkan protes terhadap dampak destruktif uji coba nuklir (Ramadani 2021). Gerakan ini kemudian dikenal sebagai *free nuclear movement*, yang bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk aktivitas nuklir di Kawasan Pasifik Selatan dan menuntut tanggung jawab dari negara-negara yang melakukan uji coba nuklir.

Kemudian pada tahun 1960-an Partai Buruh Australia dan Selandia Baru mulai mengesahkan resolusi yang menyerukan dibentuknya suatu KBSN di Kawasan ini (Wirengjurit 2002, 224). Dengan semakin kuatnya perjuangan dari

gerakan ini, negara-negara Pasifik Selatan akhirnya berhasil mewujudkan Traktat Rarotonga pada tahun 1985, sebagai langkah konkret untuk melindungi kawasan mereka dari ancaman nuklir.

Traktat Rarotonga pertama kali disahkan oleh negara-negara Pasifik Selatan yaitu Australia, Kepulauan Cook, Fiji, Kiribati, Selandia Baru, Niue, Tuvalu dan Samoa pada 6 Agustus 1985 (Wirengjurit 2002, 232). Melalui Traktat Rarotonga wilayah Pasifik Selatan merupakan *free nuclear zone* (United Nations 1985), yang artinya wilayah ini bebas nuklir baik dalam bentuk senjata nuklir, bahan nuklir maupun limbah nuklir. Perjanjian ini adalah hasil dari proses yang terbentuk bertahun-tahun dalam gerakan *free nuclear movement* di Kawasan Pasifik. Selain negara-negara Pasifik Selatan, *Greenpeace* selaku organisasi internasional turut andil dalam gerakan ini.

Kawasan Pasifik Selatan dewasa ini dipengaruhi oleh dua kekuatan besar yakni Amerika Serikat dan China (Darmawan dan Abdurrohim 2023, 53). Ditandai dengan dominasi China yang semakin meningkat di Pasifik Selatan dan agresivitasnya di Laut China Selatan dan Selat Taiwan serta perkembangan militer dan ekspansi militer berupa rencana pembangunan pangkalan militer di luar teritorial China (Ulum dan Windiani 2023, 424).

Selain itu, terdapat pengalihan hubungan diplomatik antara Kepulauan Solomon dengan Taiwan yang kemudian beralih ke China. Ini menjadi tanda peringatan bagi Australia sebagai kekuatan hegemonik di kawasan ini. Sebagai emansipasi Australia dalam menjaga Pasifik Selatan dan harmonisasi regional,

Australia menggandeng sekutunya yaitu Amerika Serikat dan Inggris sebagai manuver untuk memperkuat kekuatan di kawasan ini.

Kawasan ini mampu menarik semua mata entitas internasional untuk memperhatikan stabilitas keamanan di *region* ini. Ini menegaskan bahwa wilayah Pasifik Selatan merupakan kawasan yang patut diperhitungkan untuk menjamin harmonisasi kawasan sekitar. Akan tetapi karena wilayah Pasifik Selatan yang terdiri dari kawasan negara-negara kepulauan kecil dan stabilitas politik yang rentan, membuat kawasan ini sangat rawan terhadap intervensi asing dalam kegiatan perdagangan maupun militer. Salah satu anggota dari kawasan ini pada akhirnya bergabung dalam Pakta Pertahanan Trilateral AUKUS yang terdiri dari Australia, Inggris dan Amerika Serikat pada September 2021 (Australia, Prime minister of 2023).

Sejak diumumkannya AUKUS, berbagai negara mulai memberikan respon salah satunya yaitu China yang menganggap AUKUS sebagai ancaman yang merusak stabilitas regional. Sebagai respon terhadap AUKUS, China mengajukan permohonan bergabung kepada Perjanjian Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau yang dikenal dengan *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific* pada tanggal 16 September 2021 (Purnamasari dan Sushanti 2023, 112). Langkah ini sebagai respon untuk memisahkan blok perdagangan antara AS dan sekutunya. Di sisi lain, Filipina adalah salah satu negara yang mendukung AUKUS, pasalnya Filipina menganggap hal ini dapat mengimbangi kekuatan China dominan di Kawasan Indo Pasifik (Delanova 2021, 267).

Reaksi beragam turut datang dari negara-negara Kawasan Pasifik Selatan. Melalui juru bicara Davis Panuelo, selaku Presiden Negara Federasi Mikronesia, mengatakan percaya bahwa AUKUS mendukung kepentingan keamanan kawasan dan percaya bahwa Australia akan terus mematuhi praktik regional dan internasional terkait non-proliferasi nuklir (Wright 2023). Sementara itu, pemimpin oposisi Vanuatu, Ralph Regevanu, menyatakan kekecewaan dan ketakutannya terhadap masa depan Pasifik (Middleby, Powles dan Wallis 2021).

Simon Kofe, Menteri Luar Negeri Tuvalu, menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, melalui unggahan di platform X (dulu Twitter). Dalam tanggapannya, Kofe menekankan bahwa ketika kita membahas keberadaan kapal selam bertenaga nuklir di kawasan Pasifik, penting pula untuk merespons kekhawatiran yang muncul terkait meningkatnya militerisasi di wilayah tersebut (Wright 2023). Menurutnya, keamanan kawasan tidak hanya menyangkut kekuatan militer, tetapi juga menyangkut ketenangan dan keberlanjutan bagi masyarakat Pasifik. (terdapat pada halaman 117)

Oleh sebab itu, dengan hadirnya Pakta Pertahanan Trilateral AUKUS tentu saja ini bersumbangsih pada dinamika keamanan di Kawasan Pasifik Selatan. Karena secara historis uji coba nuklir di kawasan ini merupakan masa suram bagi negara-negara di kawasan ini. Uji coba nuklir tidak hanya merusak alam yang menjadi rumah mereka, namun membawa bencana kelaparan dan gangguan kronis pada kesehatan. Faktor-faktor inilah yang mengakibatkan timbulnya *legacy of distrust* bagi negara-negara anggota Kawasan Pasifik Selatan

Dari awal berdirinya Australia di kawasan ini, Australia menunjukkan ambisinya untuk menjadi pelindung negara-negara Pasifik Selatan melalui berbagai dukungan terhadap kebijakan masing-masing negara di Kawasan Pasifik Selatan. Sikap Australia ini bertujuan untuk menjaga stabilitas regional wilayah Pasifik, selain itu alasan terbesar adalah untuk mengamankan kontrol dari sumber daya alam yang ada di kawasan. Kemudian setelah berakhirnya Perang Dunia ke II, Australia beralih meminta bantuan dari Inggris ke Amerika Serikat yang menjadikan Australia sebagai wakil AS di kawasan Pasifik Selatan (El-Haq dan El-Islam 2020, 55).

Kerjasama dalam kerangka AUKUS bertujuan untuk mewujudkan keamanan kolektif di Kawasan Indo-Pasifik. Pada pilar pertama dari AUKUS yaitu berfokus pada dukungan terhadap Australia untuk memperoleh armada kapal selam bertenaga nuklir pertama yang dipersenjatai secara konvensional (Tobin 2024). Australia mempertegas posisinya di Kawasan Pasifik Selatan dengan menjalin kerjasama di bidang pertahanan bersama AS dan Inggris melalui AUKUS. Lantas kerjasama ini menimbulkan pertanyaan masyarakat global bagaimana posisi Australia di Kawasan Pasifik Selatan yang merupakan zona bebas nuklir. Tindakan ini menunjukkan bahwa Australia lebih mementingkan kepentingan nasionalnya tanpa memikirkan dampaknya terhadap keamanan kawasan.

Peningkatan kekuatan militer dalam kerjasama trilateral AUKUS antara Australia, Amerika Serikat dan Inggris tentu saja menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap stabilitas geopolitik dan keamanan di Kawasan Pasifik Selatan. Kerjasama ini memungkinkan Australia mempunyai kapal selam bertenaga nuklir

di beberapa tahun mendatang, hal ini didukung oleh alat, teknologi maupun sarana pendukung yang telah dimiliki oleh Inggris maupun AS yang mendukung. Kerjasama dalam kerangka ini pada dasarnya berfokus untuk menjaga stabilitas keamanan di Pasifik Selatan yang dalam beberapa dekade terakhir turut diwarnai oleh kerjasama yang terjalin antar China dan negara-negara di Pasifik Selatan.

Berdasarkan pemaparan di atas, pembentukan kerja sama keamanan trilateral AUKUS di kawasan bebas nuklir menjadi isu yang penting dan menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, topik ini layak untuk diteliti secara lebih mendalam dan komprehensif dalam penelitian ini dengan judul **“Implikasi Keanggotaan Australia dalam AUKUS terhadap Implementasi *Free Nuclear Movement* di Kawasan Pasifik Selatan.”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, implikasi keanggotaan Australia dalam AUKUS terhadap implementasi *free nuclear movement* di Kawasan Pasifik Selatan menjadi penting dan menarik untuk diteliti serta akan dibahas secara lebih dalam pada penelitian ini dengan pertanyaan penelitian **“Bagaimana implikasi keanggotaan Australia dalam AUKUS terhadap implementasi *Free Nuclear Movement* di Kawasan Pasifik Selatan?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana implikasi yang ditimbulkan dari keanggotaan Australia dalam Pakta Pertahanan Trilateral AUKUS

yang diprakarsai oleh Australia, Inggris dan Amerika Serikat di Kawasan Pasifik Selatan dengan posisi Pasifik Selatan sebagai kawasan *free nuclear* sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap Stabilitas Keamanan Regional.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti berharap penelitian ini dapat bersumbangsih secara akademis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kajian hubungan internasional pada bidang politik, hukum dan keamanan global yang berkaitan dengan pengetahuan ilmu hubungan internasional yang berfokus pada Implikasi Keanggotaan Australia dalam AUKUS terhadap Implementasi *Free Nuclear Movement* di Kawasan Pasifik Selatan, dengan melihat bagaimana suatu perjanjian dan pakta dalam mengikat sebuah negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan bacaan dan rujukan bagi para akademisi maupun Masyarakat Indonesia yang tertarik dengan Kawasan Pasifik Selatan dan ingin lebih mengetahui bagaimana stabilitas keamanan di kawasan ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini terdiri atas lima bab, dalam setiap Bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang Implikasi keanggotaan Australia dalam AUKUS terhadap Implementasi *Free Nuclear Movement* di Kawasan Pasifik Selatan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang menjelaskan tentang Implikasi keanggotaan Australia dalam AUKUS terhadap Implementasi *Free Nuclear Movement* di Kawasan Pasifik Selatan dan memuat metode penelitian yang akan menjadi arah peneliti dalam penelitian ini.

BAB III SEJARAH UJI COBA NUKLIR DAN LAHIRNYA FREE NUCLEAR MOVEMENT SERTA TRAKTAT RAROTONGA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN

Bab ini peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai Sejarah dan dampak uji coba nuklir, lahirnya *free nuclear movement*, dan Perjalanan terbentuknya Traktat Rarotonga di Pasifik Selatan.

BAB IV IMPLIKASI KEANGGOTAAN AUSTRALIA DALAM AUKUS DAN REAKSI NEGARA-NEGARA KAWASAN PASIFIK SELATAN

Bab ini peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai latar belakang keanggotaan Australia dalam AUKUS, reaksi negara-negara Pasifik Selatan dan Regional Security Complex di Kawasan Pasifik Selatan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi sub-bab terkait Kesimpulan dan rekomendasi terkait hasil akhir penelitian

